

Hambatan Integrasi Mitigasi Bencana dan Kebijakan Lingkungan dalam Penanganan Pergerakan Tanah di Kabupaten Sukabumi

Alya Eprili Suhendar¹

¹Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung, Indonesia

alyaeprili567@gmail.com¹

Keywords:

policy integration¹
 disaster mitigation²
 landslides³
 environmental
 governance⁴
 Sukabumi Regency⁵

Abstract: Landslides are a frequent disaster in Sukabumi Regency and have an impact on public safety, environmental damage, and regional development. This study aims to analyze the barriers to the integration of disaster mitigation policies and environmental policies in addressing landslides in Sukabumi Regency. The study employs a qualitative approach using descriptive methods through interviews, documentation, and analysis of local policy documents. The analysis utilizes the Policy Integration Framework, which encompasses the dimensions of policy frame, subsystem involvement, policy goals, and policy instruments. The results indicate that policy integration has not been optimal due to weak cross-sectoral coordination, a tendency toward sectoral policy implementation, and the fact that disaster risk reduction often takes a backseat to economic development priorities. This study recommends strengthening inter-agency coordination, synchronizing local policies, developing an integrated data system, and increasing community involvement in sustainable disaster mitigation. Additionally, spatial planning oversight and local budgeting patterns do not yet support preventive mitigation efforts, resulting in disaster management that remains focused on long-term post-disaster response in the region.

Kata Kunci:

integrasi kebijakan¹
 mitigasi bencana²
 pergerakan tanah³
 tata kelola
 lingkungan⁴
 Kabupaten
 Sukabumi⁵

Abstrak: Pergerakan tanah merupakan bencana yang sering terjadi di Kabupaten Sukabumi dan berdampak pada keselamatan masyarakat, kerusakan lingkungan, serta pembangunan wilayah. Penelitian ini bertujuan menganalisis hambatan integrasi kebijakan mitigasi bencana dan kebijakan lingkungan dalam penanganan pergerakan tanah di Kabupaten Sukabumi. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif melalui wawancara, dokumentasi, dan analisis dokumen kebijakan daerah. Analisis dilakukan menggunakan Policy Integration Framework yang mencakup dimensi policy frame, subsystem involvement, policy goals, dan policy instruments. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi kebijakan belum berjalan optimal karena koordinasi lintas sektor masih lemah, pelaksanaan kebijakan cenderung sektoral, serta pengurangan risiko bencana sering kalah prioritas dibanding kepentingan pembangunan ekonomi. Penelitian ini merekomendasikan penguatan koordinasi antarlembaga, sinkronisasi kebijakan daerah, pengembangan sistem data terpadu, dan peningkatan keterlibatan masyarakat dalam mitigasi bencana secara berkelanjutan. Selain itu, pengawasan tata ruang dan pola penganggaran daerah belum

mendukung upaya mitigasi preventif sehingga penanganan bencana masih berfokus pada respons pascabencana jangka panjang di daerah.

Pendahuluan

Kabupaten Sukabumi secara geomorfologi merupakan salah satu wilayah di Jawa Barat yang berada pada Zona Kerentanan Gerakan Tanah Menengah hingga Tinggi akibat bentang alamnya yang didominasi oleh perbukitan terjal dan struktur tanah yang sangat peka terhadap perubahan tata guna lahan. Ketika curah hujan dengan intensitas tinggi dan berdurasi lama melanda kawasan rawan tersebut, akumulasi air memicu ketidakstabilan lereng yang mengakibatkan bencana hidrometeorologi berupa tanah longsor mendadak maupun pergerakan tanah lambat atau rayapan. Berdasarkan catatan sejarah kebencanaan regional, fenomena geologi ini memberikan dampak destruktif yang masif, mulai dari kerusakan struktural fasilitas publik, amblesnya ratusan permukiman warga, hingga munculnya ancaman korban jiwa dan gelombang pengungsian penduduk secara berulang (BMKG, 2024).

Urgensi integrasi kebijakan pengelolaan wilayah semakin mendesak seiring meluasnya zona kerentanan geologis yang kini mengancam hampir seluruh wilayah administratif Kabupaten Sukabumi. Data spasial lintas instansi mencatat lonjakan drastis pada zona merah kerentanan gerakan tanah, yaitu dari 20% menjadi 70% dari total luas daerah. Eskalasi ancaman ini terdokumentasi secara kronologis melalui serangkaian peristiwa destruktif. Peristiwa tersebut dimulai dari longsor fatal di Kecamatan Cisolok pada tahun 2018 yang menewaskan 32 jiwa. Selanjutnya, akumulasi bencana hidrometeorologi meningkat signifikan sepanjang periode 2021–2023 dengan catatan 792 gerakan tanah dan 359 tanah longsor, termasuk fenomena rayapan tanah di Kecamatan Nyalindung yang memaksa relokasi terhadap 152 kepala keluarga (Geologi, 2024). Dampak pergerakan tanah terus meluas pada tahun-tahun berikutnya. Pada tahun 2025, terekam insiden amblesan jalan sepanjang 50 meter yang memutus akses di wilayah. Krisis geologis ini mencapai puncaknya pada rentang Februari hingga Maret 2026 di Kecamatan Bantargadung, saat curah hujan ekstrem memicu infiltrasi air tinggi yang melunakkan karakteristik tanah lempung porus. Dampak dari fasa kritis tersebut

mengakibatkan kerusakan pada 114 unit bangunan serta evakuasi massal ratusan warga di bawah penetapan status Tanggap Darurat . Secara kumulatif, manifestasi pergerakan tanah di Kabupaten Sukabumi telah berdampak luas pada 39 kecamatan, 184 desa, dan mengancam keselamatan struktur 5.492 rumah. Realitas empiris ini merefleksikan masih lemahnya penegakan instrumen mitigasi di tingkat tapak. Oleh karena itu, pengarusutamaan peta zonasi kerentanan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) serta pembatasan alih fungsi lahan lereng kritis menjadi regulasi yang mendesak demi menjamin keselamatan Masyarakat (BMKG, 2026; BNPB, 2019; BPBD Kabupaten Sukabumi, 2026b; BPBD Provinsi Jawa Barat, 2025; Pemerintah Kabupaten Sukabumi, 2024; Polri, 2026; PVMBG, 2024b Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Kabupaten Sukabumi, 2023)

Integrasi kebijakan dipahami sebagai upaya menghubungkan berbagai sektor untuk menangani persoalan publik yang kompleks, meski implementasinya kerap terhambat oleh fragmentasi birokrasi, konflik kepentingan, dan ketidaksinkronan kebijakan (Knill & Tosun, 2020). Dalam konteks kebencanaan, mitigasi bencana mencakup pengendalian tata ruang, perlindungan lingkungan, dan penguatan kesiapsiagaan masyarakat , sementara kebijakan lingkungan berperan menjaga keberlanjutan ekosistem guna menekan risiko bencana (Knill & Tosun, 2020). Penelitian ini menggunakan Policy Integration Framework Candel dan Biesbroek yang mencakup empat dimensi: *policy frame*, *subsystem involvement*, *policy goals*, dan *policy instruments* (PVMBG, 2018). Berbeda dari kajian terdahulu yang umumnya bertumpu pada aspek teknis seperti pemetaan longsor dan simulasi gerakan tanah (Prawira dkk., 2024; Yo, 2019; Merawati dkk., 2022), penelitian ini berfokus pada analisis integrasi kebijakan mitigasi bencana dan kebijakan lingkungan dalam perspektif tata kelola pemerintahan daerah.

Kondisi lapangan menunjukkan penanganan pergerakan tanah di Kabupaten Sukabumi belum optimal karena kebijakan tata ruang belum terintegrasi secara efektif dengan strategi mitigasi bencana. Hal ini memunculkan hambatan berlapis: koordinasi antarinstansi yang lemah, keterbatasan anggaran relokasi, penolakan sebagian warga

untuk dipindahkan, alih fungsi lahan lereng menjadi area pertanian yang tidak terkendali, serta lemahnya penegakan hukum lingkungan di tingkat lokal. Kondisi tersebut menegaskan perlunya evaluasi mendalam untuk merumuskan strategi mitigasi yang lebih efektif dan adaptif.

Penelitian ini bertujuan menganalisis keselarasan antara kebijakan lingkungan pemerintah daerah dengan strategi mitigasi pergerakan tanah, mengidentifikasi hambatan anggaran, administrasi, dan sosial yang memengaruhi efektivitas penanganan, serta merumuskan rekomendasi strategi mitigasi yang lebih adaptif. Secara akademis, penelitian ini diharapkan memperkaya kajian integrasi mitigasi bencana dan kebijakan lingkungan pada wilayah rawan geologis. Secara praktis, hasilnya diharapkan menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi bagi pemerintah daerah dalam memperkuat koordinasi kebijakan, pengawasan tata ruang, dan implementasi mitigasi guna mengurangi risiko kerusakan lingkungan serta dampak sosial di Kabupaten Sukabumi.

Tinjauan Literatur

Hambatan didefinisikan sebagai halangan atau rintangan yang bermakna penting karena menjadi keadaan yang memicu terganggunya pelaksanaan suatu (Departemen Pendidikan Nasional, 2002). Integrasi kebijakan didefinisikan sebagai proses menanamkan isu-isu kebijakan lintas sektor di seluruh subsistem kebijakan tradisional yang terfragmentasi, dengan tujuan untuk mengatasi masalah-masalah sosial yang kompleks secara efektif. Hal ini mencakup integrasi horizontal antar sektor dan integrasi vertikal dalam tata kelola multi-tingkat, yang berkembang melalui refleksi dan pembelajaran dari pengalaman masa lalu (Biesbroek, 2021). Mitigasi merupakan rangkaian tindakan proaktif untuk meminimalkan dampak buruk bencana alam dan buatan manusia terhadap lingkungan sosial Masyarakat (Carter, 1991). Kebijakan lingkungan merupakan regulasi pemerintah yang mengintegrasikan aspek perlindungan alam ke dalam pembangunan ekonomi guna mencapai pembangunan manusia yang berkelanjutan (Weale & Jordan, 2001). Pergerakan tanah didefinisikan sebagai perpindahan massa tanah atau batu pada arah tegak (vertikal), mendatar (horizontal), atau miring dari posisi

asalnya yang mencakup gerak rayapan (*creep*), aliran (*flow*), serta longsor (Widjojo, 1985).

Penelitian ini menggunakan Teori Integrasi Kebijakan (Policy Integration Theory) dari Jeroen J. L. Candel dan Robbert Biesbroek (2016) untuk menganalisis hambatan integrasi antara mitigasi bencana dan kebijakan lingkungan dalam penanganan pergerakan tanah di Kabupaten Sukabumi. Teori ini memandang integrasi kebijakan bukan sebagai hasil akhir yang statis, melainkan sebagai proses tata kelola yang dinamis, berkelanjutan, dan asinkron dalam menghubungkan berbagai sektor kebijakan guna menyelesaikan persoalan publik yang kompleks dan lintas sektoral. Tingkat integrasi tersebut diukur melalui empat dimensi utama, yaitu bingkai kebijakan (*policy frame*) yang menilai perluasan perspektif aktor terhadap tanggung jawab kolektif, keterlibatan subsistem (*subsystem involvement*) yang mengukur interaksi horizontal antarlembaga, tujuan kebijakan (*policy goals*) yang menyoroti sinkronisasi target dalam dokumen perencanaan daerah, serta instrumen kebijakan (*policy instruments*) yang menganalisis keselarasan alat operasional seperti anggaran, regulasi teknis, dan penegakan sanksi (Candel & Biesbroek, 2016).

Penelitian mengenai pergerakan tanah dan mitigasi bencana di Kabupaten Sukabumi telah dilakukan melalui berbagai pendekatan ilmiah yang berfokus pada aspek fisik-teknis maupun penguatan kapasitas sosial masyarakat. Prawira, Mataburu, dan Hijrawadi (2024) menggunakan pendekatan kuantitatif berbasis Sistem Informasi Geografis (SIG) dengan metode overlay dan pembobotan parameter untuk memetakan tingkat kerawanan longsor di Kecamatan Purabaya sehingga mampu mengidentifikasi wilayah prioritas penanganan darurat, meskipun penelitian tersebut masih terbatas pada analisis spasial dan belum membahas aspek kelembagaan maupun integrasi regulasi lingkungan (Prawira dkk., 2024). Selanjutnya, Yo (2019) meneliti karakteristik aliran tanah (*mudflow*) di Desa Sirnaresmi melalui simulasi digital FLO-2D dan RAMMS guna mengukur durasi, kecepatan, serta ketebalan longsor, dengan rekomendasi berupa relokasi total warga di kawasan rawan, namun belum meninjau potensi benturan regulasi sektoral dalam implementasi relokasi pada kawasan lindung atau konservasi (Yo, 2019).

Pendekatan teknologi informasi dikembangkan oleh Merawati dkk. (2022) melalui pembangunan platform SIG berbasis web menggunakan Open Street Maps untuk meningkatkan aksesibilitas data geospasial titik rawan pergerakan tanah di Kabupaten Sukabumi, tetapi penelitian tersebut masih berorientasi pada pengembangan perangkat lunak dan belum mengulas integrasi kebijakan kebencanaan dengan instrumen perlindungan lingkungan hidup (Merawati dkk., 2022). Dari aspek geofisika, Indrawan dkk. (2019) menerapkan metode Horizontal-to-Vertical Spectral Ratio (HVSr) menggunakan gelombang mikroseismik alami untuk mengidentifikasi kedalaman bidang gelincir bawah permukaan di wilayah rawan Sukabumi, yang memberikan kontribusi penting dalam pemetaan kerentanan struktural tanah, walaupun fokus kajiannya masih berada pada ranah eksplorasi ilmiah dan belum menyentuh dimensi tata kelola pemerintahan daerah (Indrawan dkk., 2019). Sementara itu, Tahani dkk. (2026) meneliti penguatan kapasitas non-struktural anggota Linmas di Desa Pasir Suren melalui pelatihan interaktif dan simulasi lapangan yang terbukti meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat di tingkat lokal, namun belum membahas hambatan koordinasi birokrasi dalam menyinergikan program kesiapsiagaan desa dengan kebijakan konservasi dan anggaran daerah tingkat kabupaten (Tahani dkk., 2026).

Berdasarkan literatur tersebut, penelitian tentang pergerakan tanah di Kabupaten Sukabumi masih didominasi pendekatan teknis seperti pemetaan longsor, analisis geologi, simulasi gerakan tanah, dan peningkatan kesiapsiagaan masyarakat. Akibatnya, aspek kelembagaan, sinkronisasi kebijakan, dan koordinasi lintas sektor dalam mitigasi bencana masih kurang mendapat perhatian. Oleh karena itu, novelty penelitian ini terletak pada analisis integrasi kebijakan mitigasi bencana dan kebijakan lingkungan menggunakan Policy Integration Framework dari Candel dan Biesbroek. Penelitian ini menelaah penanganan pergerakan tanah di Kabupaten Sukabumi melalui empat dimensi integrasi kebijakan, yaitu keselarasan bingkai kebijakan, keterlibatan aktor lintas sektor, sinkronisasi tujuan kebijakan dalam dokumen perencanaan, serta integrasi instrumen kebijakan dalam implementasi dan pengawasan tata ruang di kawasan rawan bencana.

Metode Penelitian

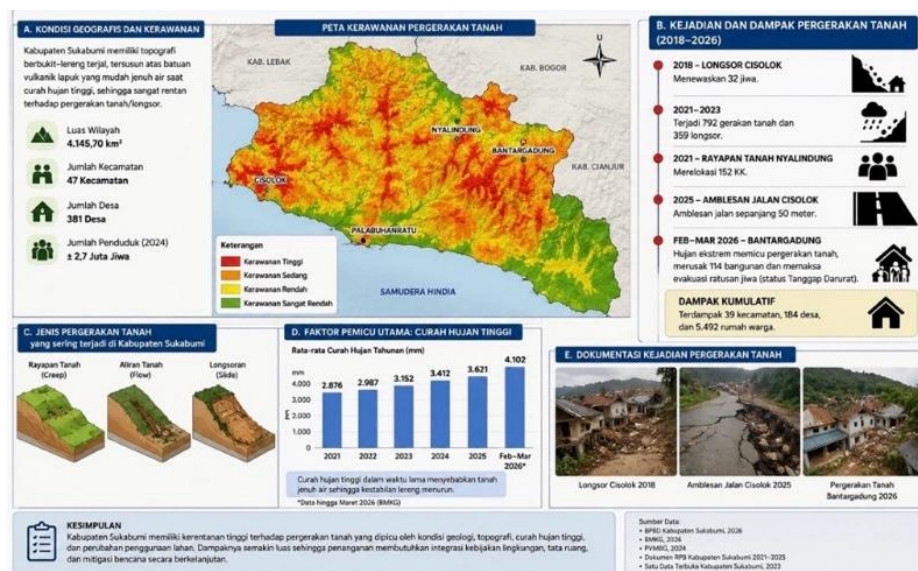
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur (library research) yang bersifat deskriptif-analitis untuk mengkaji hambatan integrasi kebijakan mitigasi bencana dan kebijakan lingkungan dalam penanganan pergerakan tanah di Kabupaten Sukabumi. Pendekatan ini dipilih untuk menggambarkan kondisi faktual sekaligus menganalisis faktor penyebab belum optimalnya kolaborasi antarinstansi pemerintah daerah. Analisis penelitian dipandu oleh Policy Integration Framework yang digunakan untuk mengidentifikasi hambatan institusional melalui empat dimensi, yaitu cara pandang instansi (policy frame), koordinasi horizontal antarlembaga (subsystem involvement), keselarasan dokumen rencana strategis (policy goals), serta integrasi instrumen operasional berupa anggaran dan aturan tata ruang (policy instruments) (Candel & Biesbroek, 2016). Seluruh argumentasi penelitian dibangun menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi dokumentasi dan penelusuran literatur terkait kebencanaan serta kebijakan publik. Sumber data meliputi jurnal ilmiah, buku, artikel penelitian, dokumen kebijakan, dan laporan resmi dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, serta Dinas Lingkungan Hidup. Data tambahan juga diperoleh dari rilis resmi pemerintah dan portal informasi daerah yang memuat kronologi peristiwa pergerakan tanah di Kabupaten Sukabumi. Pengumpulan data dilakukan melalui proses seleksi, klasifikasi, dan pengelompokan sumber secara tematik berdasarkan relevansi dan kredibilitas teoritis guna menghasilkan data sekunder yang valid dan mendukung akurasi analisis (Snyder, 2019).

Data sekunder dianalisis menggunakan teknik deskriptif kualitatif melalui tiga tahap, yaitu reduksi data untuk menyaring informasi penting, penyajian data dalam uraian naratif sistematis, dan penarikan kesimpulan secara induktif. Tahap akhir dilakukan dengan membandingkan temuan empiris dengan parameter teoritis Policy Integration Framework untuk mengidentifikasi tipologi hambatan kebijakan penanganan bencana di Kabupaten Sukabumi (Miles et al., 2014). Untuk menjaga keabsahan data,

penelitian ini menerapkan triangulasi sumber dengan membandingkan data dari jurnal, dokumen hukum pemerintah, laporan teknis kebencanaan, dan statistik daerah agar hasil analisis memiliki validitas akademik yang kuat (Flick, 2018). Penelitian ini dibatasi pada analisis kebijakan publik dan tata kelola pemerintahan daerah sehingga tidak membahas aspek teknis seperti mekanika tanah, rekayasa lereng, maupun geologi murni.

Hasil Penelitian

4.1. Gambaran Umum Pergerakan Tanah di Kabupaten Sukabumi



Gambar 4.1.1 Kondisi Kerawanan Pergerakan Tanah di Kabupaten Sukabumi.

Sumber: (BPBD Kabupaten Sukabumi, 2026; PVMKG, 2024; Pemerintah Kabupaten Sukabumi, 2021).

Gambar 4.1.1 memperlihatkan bahwa pergerakan tanah di Kabupaten Sukabumi bukan lagi kejadian insidental, tetapi sudah menjadi ancaman yang terus berulang dan meluas di berbagai wilayah. Kondisi geografis berupa lereng curam dan tanah vulkanik yang mudah lapuk memang menjadi faktor utama, namun tingginya kejadian pergerakan tanah juga menunjukkan adanya persoalan dalam pengelolaan wilayah dan pengendalian lingkungan. Dalam beberapa tahun terakhir, wilayah rawan tidak hanya berada di kawasan

pegunungan terpencil, tetapi mulai mendekati permukiman, jalan utama, dan lahan produktif masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa tekanan terhadap lingkungan terus meningkat, terutama akibat pembukaan lahan di lereng serta penggunaan ruang yang tidak sepenuhnya mempertimbangkan tingkat kerawanan bencana. Kondisi tersebut membuat pergerakan tanah di Kabupaten Sukabumi tidak dapat dipandang hanya sebagai persoalan alam semata. Risiko bencana semakin besar karena kerentanan lingkungan berjalan beriringan dengan lemahnya pengawasan tata ruang dan meningkatnya aktivitas manusia di kawasan rawan. Akibatnya, ketika curah hujan tinggi terjadi, dampak yang ditimbulkan tidak hanya berupa longsor kecil, tetapi juga kerusakan infrastruktur, gangguan aktivitas ekonomi, hingga ancaman keselamatan masyarakat dalam skala yang lebih luas.



Gambar 4.1.2 Data Terbaru Bencana Pergerakan Tanah Kabupaten Sukabumi.

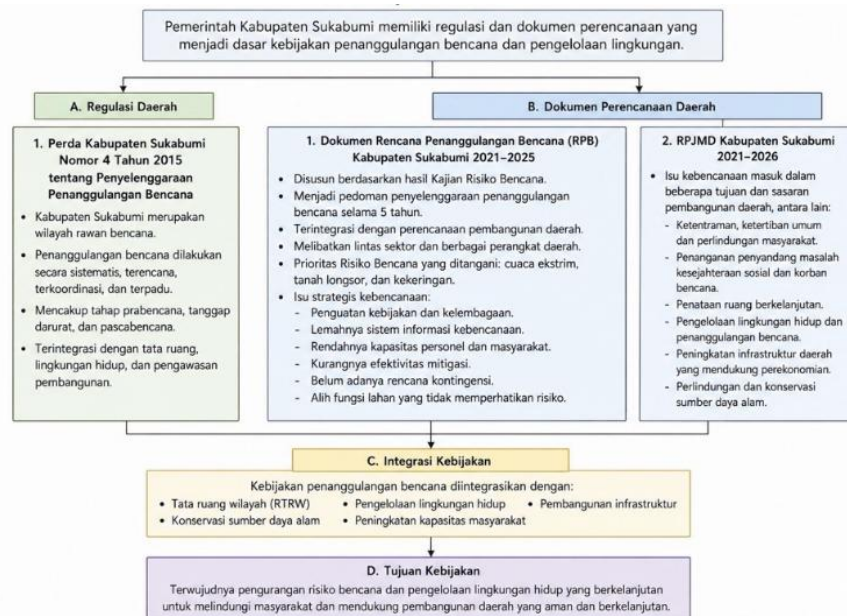
Sumber: (Awaludin, 2023; Detikcom, 2024; Fatimah, 2023; C. Indonesia, 2026; M. Indonesia, 2023; Liputan6, 2026; Megapolitan, 2021; Tatar Sukabumi, 2019).

Gambar 4.4 menunjukkan bahwa hambatan integrasi kebijakan mitigasi bencana dan kebijakan lingkungan memberikan dampak yang cukup besar

terhadap penanganan pergerakan tanah di Kabupaten Sukabumi. Dampak tersebut terlihat dari kerusakan infrastruktur jalan, retakan tanah dan amblesan, pengungsian warga, kerusakan fasilitas pendidikan, kerugian sektor pertanian, kerusakan lahan dan lingkungan, terganggunya aktivitas masyarakat, hingga meningkatnya risiko bencana lanjutan. Kondisi ini memperlihatkan bahwa pergerakan tanah tidak hanya menjadi persoalan kebencanaan, tetapi juga berdampak luas terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan lingkungan masyarakat. Kerusakan jalan dan infrastruktur menunjukkan bahwa kawasan rawan bencana masih belum sepenuhnya terlindungi dalam kebijakan tata ruang daerah. Selain itu, retakan tanah dan amblesan yang terus terjadi menandakan bahwa kondisi lingkungan di beberapa wilayah sudah mengalami tekanan yang cukup tinggi akibat pemanfaatan lahan yang tidak terkendali. Dampak tersebut diperparah dengan munculnya pengungsian warga dan kerusakan rumah yang menunjukkan masih lemahnya langkah mitigasi preventif dan relokasi di kawasan rawan.

Pada sektor sosial, kerusakan fasilitas pendidikan dan terganggunya aktivitas masyarakat memperlihatkan bahwa bencana pergerakan tanah memengaruhi pelayanan publik dan aktivitas sehari-hari masyarakat. Sementara itu, kerusakan lahan pertanian dan lingkungan menyebabkan kerugian ekonomi masyarakat karena banyak lahan produktif yang rusak akibat longsor dan pergeseran tanah. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa lemahnya koordinasi antarinstansi dan belum optimalnya integrasi kebijakan membuat penanganan bencana masih lebih berorientasi pada respons darurat dibandingkan pengurangan risiko jangka panjang. Secara keseluruhan, gambar tersebut menegaskan bahwa dampak pergerakan tanah di Kabupaten Sukabumi bersifat multidimensional dan terus berulang setiap tahun. Oleh karena itu, diperlukan penguatan integrasi kebijakan antara mitigasi bencana, pengawasan tata ruang, dan perlindungan lingkungan agar penanganan pergerakan tanah dapat dilakukan secara lebih efektif, terpadu, dan berkelanjutan.

4.2. Kebijakan Penanggulangan Bencana dan Kebijakan Lingkungan di Kabupaten Sukabumi



Gambar 4.2 Integrasi Kebijakan Penanggulangan Bencana dan Kebijakan Lingkungan di Kabupaten Sukabumi

Sumber: (Pemerintah Kabupaten Sukabumi, 2015; Pemerintah Kabupaten Sukabumi, 2019; Pemerintah Kabupaten Sukabumi, 2023; Pemerintah Kabupaten Sukabumi, 2021)

Gambar 4.2 menunjukkan bahwa secara administratif Kabupaten Sukabumi sebenarnya sudah memiliki cukup banyak dokumen kebijakan yang mengatur penanggulangan bencana dan pengelolaan lingkungan. Masalah utamanya bukan terletak pada ketiadaan regulasi, tetapi pada bagaimana kebijakan tersebut diterapkan secara konsisten di lapangan. Berbagai dokumen seperti RPB, RTRW, RPJMD, dan RPPLH telah memuat pengurangan risiko bencana sebagai bagian dari pembangunan daerah. Namun dalam praktiknya, integrasi antar kebijakan masih terlihat lemah. Di satu sisi pemerintah mendorong perlindungan kawasan rawan bencana, tetapi di sisi lain aktivitas pembangunan dan pemanfaatan lahan di wilayah rentan masih terus

berlangsung. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan sering kali berhenti spada level perencanaan administratif dan belum sepenuhnya menjadi dasar pengambilan keputusan pembangunan. Akibatnya, mitigasi bencana cenderung berjalan sendiri, sementara kebijakan lingkungan dan tata ruang belum mampu mengendalikan tekanan terhadap kawasan rawan pergerakan tanah secara nyata.

4.3. Hambatan Integrasi Mitigasi Bencana dan Kebijakan Lingkungan dalam Penanganan Pergerakan Tanah di Kabupaten Sukabumi



Gambar 4.3 Hambatan Integrasi Mitigasi Bencana dan Kebijakan Lingkungan di Kabupaten Sukabumi

Sumber: (Pemerintah Kabupaten Sukabumi, 2015; Pemerintah Kabupaten Sukabumi, 2019; Pemerintah Kabupaten Sukabumi, 2023)

Gambar 4.3 memperlihatkan bahwa hambatan integrasi kebijakan di Kabupaten Sukabumi tidak hanya berasal dari faktor teknis, tetapi juga dipengaruhi oleh lemahnya koordinasi kelembagaan dan perbedaan prioritas antarinstansi. Penanganan pergerakan tanah masih cenderung berjalan sektoral sehingga masing-masing lembaga bekerja berdasarkan kepentingan programnya sendiri. Situasi tersebut menyebabkan kebijakan mitigasi sering tidak terhubung secara langsung dengan pengawasan tata ruang maupun

perlindungan lingkungan. Akibatnya, kawasan yang sebenarnya memiliki tingkat kerawanan tinggi masih terus dimanfaatkan untuk pertanian, permukiman, bahkan pembangunan infrastruktur. Dalam jangka panjang, kondisi ini memperbesar tekanan terhadap lereng dan meningkatkan potensi bencana. Selain itu, keterbatasan anggaran membuat upaya mitigasi lebih banyak difokuskan pada penanganan darurat setelah bencana terjadi dibandingkan pencegahan jangka panjang. Program seperti rehabilitasi lereng, relokasi warga, dan pengawasan kawasan rawan belum mampu dilakukan secara menyeluruh. Hal ini menunjukkan bahwa integrasi kebijakan di Kabupaten Sukabumi masih bersifat administratif dan belum sepenuhnya berjalan efektif dalam implementasi nyata di lapangan.

4.4. Dampak Hambatan Integrasi Kebijakan terhadap Penanganan Pergerakan Tanah

No.	Hambatan Utama	Dampak terhadap Penanganan Pergerakan Tanah	Kondisi yang Terjadi
1.	Perbedaan fokus antarinstansi	Penanganan pergerakan tanah dilakukan secara sektoral dan tidak terpadu.	Program lebih fokus pada penanganan darurat, belum pada pencegahan jangka panjang.
2.	Lemahnya koordinasi antarinstansi	Sinkronisasi program, perencanaan, dan pengawasan belum optimal.	Program mitigasi tidak berjalan konsisten dan terdapat tumpang tindih kewenangan.
3.	Ketidaksesuaian tata ruang dan penggunaan lahan	Pembangunan dan aktivitas masyarakat masih terjadi di wilayah rawan longsor.	Pengendalian alih fungsi lahan dan penerapan RTRW belum efektif.
4.	Keterbatasan anggaran dan program mitigasi	Program mitigasi tidak dapat dilaksanakan secara optimal dan berkelanjutan.	Relokasi, penguatan lereng, dan sistem peringatan dini berjalan terbatas.
5.	Rendahnya kesadaran dan penolakan masyarakat	Kebijakan relokasi dan pengurangan risiko sulit diterapkan secara maksimal.	Sebagian masyarakat tetap tinggal di kawasan rawan dan pemahaman risiko masih rendah.

Gambar 4.4 Dampak Hambatan Integrasi Kebijakan terhadap Penanganan Pergerakan Tanah di Kabupaten Sukabumi

Sumber: (BPBD Kabupaten Sukabumi, 2026; Pemerintah Kabupaten Sukabumi, 2021)

Gambar 4.4 menunjukkan bahwa lemahnya integrasi kebijakan berdampak langsung terhadap efektivitas penanganan pergerakan tanah di Kabupaten Sukabumi. Bencana yang terus berulang di wilayah yang sama menandakan bahwa upaya mitigasi belum mampu menyentuh akar persoalan, terutama

terkait pengendalian lingkungan dan penggunaan ruang. Kerusakan yang muncul tidak hanya berupa runtuh lereng atau rumah warga yang terdampak, tetapi juga terganggunya aktivitas ekonomi, akses pendidikan, hingga mobilitas masyarakat akibat jalan dan fasilitas umum rusak. Dalam beberapa wilayah, masyarakat bahkan harus hidup berdampingan dengan ancaman longsor karena relokasi dan penanganan permanen belum berjalan optimal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa dampak bencana menjadi semakin besar ketika kebijakan antar sektor tidak berjalan searah. Ketika tata ruang tidak mampu membatasi aktivitas di kawasan rawan dan mitigasi lebih berfokus pada respons darurat, maka risiko bencana akan terus berulang setiap musim hujan. Situasi ini memperlihatkan bahwa persoalan pergerakan tanah di Kabupaten Sukabumi bukan hanya masalah kebencanaan, tetapi juga mencerminkan belum kuatnya tata kelola lingkungan dan pembangunan daerah berbasis mitigasi risiko.

4.5. Upaya Pemerintah Daerah dalam Memperkuat Integrasi Kebijakan

No.	Upaya yang Dilakukan	Pelaksanaan	Tujuan
1.	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) 2021–2025	RPB dijadikan pedoman penanggulangan bencana daerah dan terintegrasi dengan perencanaan pembangunan.	Menyatukan langkah dan program penanggulangan bencana lintas perangkat daerah.
2.	Penguatan koordinasi lintas perangkat daerah	Melalui forum koordinasi, rapat lintas sektor, dan pembagian peran yang lebih jelas.	Meningkatkan sinergi antarinstansi dalam mitigasi pergerakan tanah.
3.	Pengembangan sistem informasi kebencanaan	Penyediaan data risiko, peta rawan, dan basis data kebencanaan daerah.	Mendukung perencanaan berbasis data dan pengambilan keputusan yang tepat.
4.	Peningkatan kapasitas masyarakat	Edukasi, pelatihan, dan sosialisasi kebencanaan pada masyarakat di wilayah rawan.	Meningkatkan kesadaran, kesiapsiagaan, dan kemampuan masyarakat menghadapi risiko.
5.	Pengendalian tata ruang dan alih fungsi lahan	Pengawasan pemanfaatan ruang dan penertiban pembangunan di kawasan rawan.	Mengurangi pemicu pergerakan tanah akibat aktivitas manusia di lereng.
6.	Penguatan pendanaan dan program mitigasi	Pengalokasian anggaran untuk mitigasi, relokasi, penguatan lereng, dan sistem peringatan dini.	Meningkatkan efektivitas program pengurangan risiko bencana.

Gambar 4.5 Upaya Pemerintah Daerah dalam Memperkuat Integrasi Kebijakan Mitigasi Bencana dan Kebijakan Lingkungan di Kabupaten Sukabumi

Sumber: (Pemerintah Kabupaten Sukabumi, 2015; Pemerintah Kabupaten Sukabumi, 2019; Pemerintah Kabupaten Sukabumi, 2021)

Gambar 4.5 menunjukkan bahwa pemerintah daerah mulai berupaya memperkuat integrasi kebijakan melalui sinkronisasi dokumen perencanaan, peningkatan koordinasi lintas sektor, serta pengembangan program mitigasi berbasis lingkungan. Langkah tersebut menunjukkan adanya kesadaran bahwa penanganan pergerakan tanah tidak bisa hanya mengandalkan penanganan darurat ketika bencana sudah terjadi. Namun, upaya yang dilakukan masih menghadapi tantangan besar dalam implementasi. Penguatan kebijakan belum sepenuhnya diikuti pengawasan yang konsisten di lapangan, terutama terhadap alih fungsi lahan dan pembangunan di kawasan rawan. Akibatnya, berbagai program mitigasi sering berjalan lambat dan belum mampu mengurangi tekanan terhadap wilayah rentan secara signifikan. Di sisi lain, pemerintah daerah juga berada pada posisi yang cukup sulit karena harus menyeimbangkan kebutuhan pembangunan daerah dengan upaya perlindungan lingkungan. Tekanan ekonomi masyarakat, kebutuhan lahan permukiman, dan keterbatasan anggaran membuat kebijakan mitigasi sering berbenturan dengan kepentingan pembangunan jangka pendek. Hal ini menunjukkan bahwa penguatan integrasi kebijakan di Kabupaten Sukabumi masih memerlukan komitmen yang lebih kuat, bukan hanya dalam penyusunan dokumen, tetapi juga dalam keberanian mengendalikan pemanfaatan ruang di kawasan rawan bencana.

Diskusi

5.1. Hambatan Integrasi Kebijakan dalam Penanganan Pergerakan Tanah di Kabupaten Sukabumi

5.1.1. Hambatan Pada Dimensi Policy Frame

Dimensi *policy frame* menekankan kesamaan cara pandang antaraktor dalam memahami persoalan publik sebagai tanggung jawab bersama lintas sektor (Candel & Biesbroek, 2016). Hambatan utama di Kabupaten Sukabumi terletak pada belum terbentuknya perspektif bersama bahwa pergerakan tanah merupakan isu pembangunan terpadu. Masing-masing instansi masih bekerja dari sudut pandang sektoralnya:

BPBD terfokus pada penanganan kedaruratan sesuai RPB (Pemerintah Kabupaten Sukabumi, 2019), DLH berorientasi pada rehabilitasi lahan kritis sesuai RPPLH (Pemerintah Kabupaten Sukabumi, 2015), sementara DPUPR mendorong pembangunan infrastruktur melalui RTRW Tahun 2023–2043 (Pemerintah Kabupaten Sukabumi, 2023). Akibatnya, mitigasi bencana belum menjadi bagian inti pembangunan daerah, terbukti dari masih berlangsungnya pembangunan di kawasan yang telah ditetapkan sebagai zona rawan gerakan tanah (PVMBG, 2024). Selain itu, kebijakan relokasi dan pembatasan ruang yang diupayakan pemerintah kerap mendapat resistensi karena masyarakat menggantungkan ekonominya pada kawasan lereng tersebut.

5.1.2. Hambatan Pada Dimensi Subsystem Involvement

Dimensi *subsystem involvement* menekankan koordinasi dan keterlibatan aktif antaraktor dalam implementasi kebijakan lintas sektor (Candel & Biesbroek, 2016). Koordinasi antarinstansi dalam penanganan pergerakan tanah di Kabupaten Sukabumi masih bersifat administratif dan belum membentuk kolaborasi yang substantif. BPBD, DLH, DPUPR, Bappelitbangda, hingga pemerintah desa masih bekerja berdasarkan tugas sektoral masing-masing sehingga sinkronisasi program mitigasi belum berjalan efektif (Pemerintah Kabupaten Sukabumi, 2019). Data kawasan rawan gerakan tanah juga belum dimanfaatkan secara terpadu, mengakibatkan pembangunan permukiman masih ditemukan di kawasan yang telah dikategorikan rawan bencana dalam RTRW (Pemerintah Kabupaten Sukabumi, 2023). Keterlibatan masyarakat pun masih terbatas pada tahap penanganan darurat, sehingga mitigasi berbasis komunitas belum berkembang optimal di tingkat local (Tahani & dkk., 2026).

5.1.3. Hambatan Pada Dimensi Policy Goals

Dimensi *policy goals* menekankan sinkronisasi tujuan antarkebijakan dan konsistensi arah pembangunan daerah (Candel & Biesbroek, 2016). Meskipun RTRW dan RPPLH Kabupaten Sukabumi telah

mengamankan pengendalian kawasan rawan pergerakan tanah (Pemerintah Kabupaten Sukabumi, 2015; Pemerintah Kabupaten Sukabumi, 2023). pembangunan permukiman, kawasan wisata, dan pertanian lereng masih terus berkembang di wilayah rawan longsor. Ini menunjukkan bahwa pembangunan daerah masih lebih berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dibandingkan pengurangan risiko bencana jangka panjang. Program relokasi pun sering menghadapi penolakan karena masyarakat menilai lokasi baru jauh dari sumber penghidupannya (Yo, 2019), sehingga tujuan pembangunan dan pengurangan risiko bencana masih kerap saling bertentangan.

5.1.4. Hambatan Pada Dimensi *policy instruments*

Dimensi *policy instruments* menjelaskan peran instrumen kebijakan dalam mendukung integrasi kebijakan secara efektif (Candel & Biesbroek, 2016). Sistem penganggaran daerah yang masih bersifat *silo budgeting* menyebabkan integrasi pembiayaan lintas sektor sangat terbatas (Pemerintah Kabupaten Sukabumi, 2019). Pengawasan tata ruang juga masih lemah, di mana alih fungsi lahan dan pembangunan di kawasan rawan terus terjadi meskipun telah diatur dalam RTRW dan RPPLH (Pemerintah Kabupaten Sukabumi, 2015; Pemerintah Kabupaten Sukabumi, 2023).. Keterbatasan sistem peringatan dini dan minimnya infrastruktur mitigasi memperlihatkan bahwa kebijakan lebih berorientasi pada respons pascabencana daripada pencegahan, padahal Kabupaten Sukabumi memiliki kerawanan yang sangat tinggi akibat dominasi kawasan perbukitan dan curah hujan ekstrem (PVMBG, 2024; BMKG, 2026).

5.2. Rekomendasi Mitigasi Pergerakan Tanah di Kabupaten Sukabumi

5.2.1. Penguatan Sinkronisasi Kebijakan Daerah

Pemerintah daerah perlu memperkuat sinkronisasi antara RTRW, RPPLH, RPJMD, dan RPB agar kebijakan tata ruang, perlindungan lingkungan, dan mitigasi bencana saling mendukung. (PVMBG, 2024;

BMKG, 2026) menegaskan bahwa integrasi kebijakan yang efektif mensyaratkan keselarasan tujuan antarsektor. Tanpa sinkronisasi ini, pengurangan risiko bencana akan selalu kalah prioritas dari kepentingan pembangunan, sebagaimana terbukti dari masih berlangsungnya pembangunan di kawasan rawan yang seharusnya dikendalikan pemanfaatannya (Pemerintah Kabupaten Sukabumi, 2023).

5.2.2. Penguatan Koordinasi dan Kolaborasi Lintas Sektor

Koordinasi yang selama ini bersifat formal-administratif perlu ditingkatkan menjadi kolaborasi nyata melalui pendekatan *collaborative governance*. (PVMBG, 2024; BMKG, 2026) menjelaskan bahwa dimensi *subsystem involvement* menuntut keterlibatan aktif seluruh aktor, bukan sekadar koordinasi prosedural. Ego sektoral antarinstansi yang masih kuat (Pemerintah Kabupaten Sukabumi, 2019) dan belum terintegrasinya sistem data kebencanaan (Pemerintah Kabupaten Sukabumi, 2023) menjadi hambatan yang perlu diatasi melalui pembangunan sistem data terpadu, forum lintas sektor yang rutin, dan pembagian peran yang lebih konkret antarinstansi.

5.2.3. Peningkatan Pengawasan Tata Ruang dan Lingkungan

Regulasi tata ruang tidak akan berdampak nyata tanpa pengawasan lapangan yang konsisten. Meskipun RTRW dan RPPLH Kabupaten Sukabumi telah mengatur pengendalian kawasan rawan bencana (Pemerintah Kabupaten Sukabumi, 2015; Pemerintah Kabupaten Sukabumi, 2023), pembangunan dan alih fungsi lahan di lereng masih terus berlangsung ekstrem (PVMBG, 2024; BMKG, 2026), menyatakan bahwa efektivitas instrumen kebijakan sangat ditentukan oleh konsistensi penerapannya, sehingga penguatan mekanisme pengawasan dan sanksi menjadi langkah yang tidak bisa ditunda.

5.2.4. Pengembangan Mitigasi Bencana Preventif

Pendekatan mitigasi perlu bergeser dari orientasi reaktif pascabencana menuju pencegahan risiko jangka panjang. Instrumen

kebijakan daerah masih lebih banyak diarahkan pada penanganan darurat dibandingkan mitigasi preventif (Pemerintah Kabupaten Sukabumi, 2019), padahal kerawanan pergerakan tanah di Kabupaten Sukabumi sangat tinggi akibat topografi perbukitan dan curah hujan ekstrem ekstrem (PVMBG, 2024; BMKG, 2026) menegaskan bahwa integrasi kebijakan membutuhkan instrumen yang menghubungkan proses pencegahan dan pengurangan risiko secara berkelanjutan, sehingga penguatan sistem peringatan dini dan infrastruktur mitigasi menjadi prioritas mendesak.

5.2.5. Peningkatan Kapasitas dan Partisipasi Masyarakat

Masyarakat perlu dilibatkan sebagai subjek aktif mitigasi, bukan sekadar objek kebijakan. menekankan bahwa integrasi kebijakan mensyaratkan keterlibatan aktor nonpemerintah sebagai bagian dari *subsystem involvement*. Namun sebagian masyarakat masih bertahan di kawasan rawan karena keterikatan ekonomi terhadap lahan sementara partisipasi dalam pengawasan lingkungan masih rendah (PVMBG, 2024; BMKG, 2026). Oleh karena itu, penguatan kapasitas melalui pengembangan desa tangguh bencana, literasi kebencanaan, dan pelibatan masyarakat dalam pemantauan lingkungan menjadi kebutuhan yang mendesak.

5.2.6. Penguatan Sistem Penganggaran Mitigasi Bencana

Pola *silo budgeting* perlu digantikan dengan skema pembiayaan lintas sektor yang terintegrasi. (PVMBG, 2024; BMKG, 2026) menjelaskan bahwa kelemahan instrumen pembiayaan menjadi hambatan terbesar dalam integrasi kebijakan. Anggaran daerah yang masih lebih banyak dialokasikan untuk penanganan darurat dibandingkan mitigasi preventif (Pemerintah Kabupaten Sukabumi, 2019) menyebabkan program rehabilitasi lingkungan dan penguatan infrastruktur mitigasi belum mendapat pendanaan yang memadai (Pemerintah Kabupaten Sukabumi, 2023). Skema pembiayaan yang terintegrasi diperlukan agar program mitigasi berjalan konsisten dan berkelanjutan, tidak hanya aktif ketika bencana sudah terjadi.

5.3. Perbandingan Temuan Penelitian dengan Penelitian Terdahulu

Penelitian-penelitian sebelumnya mengenai pergerakan tanah di Kabupaten Sukabumi masih didominasi pendekatan teknis: pemetaan kerawanan longsor berbasis SIG (Prawira dkk., 2024) simulasi pergerakan *mudflow* (Yo, 2019), pengembangan platform SIG berbasis web (Merawati dkk., 2022), analisis kerentanan struktur tanah dengan metode HVSr (Indrawan dkk., 2019), hingga pelatihan kesiapsiagaan masyarakat (Tahani dkk., 2026). Meskipun berkontribusi penting, penelitian-penelitian tersebut belum menyentuh dimensi integrasi kebijakan dan koordinasi kelembagaan. Padahal kejadian pergerakan tanah yang terus berulang sejak 2019 hingga 2026 di 39 kecamatan dan 184 desa (BPBD Kabupaten Sukabumi, 2026) mengindikasikan adanya persoalan lebih dalam yang tidak bisa dijawab hanya dengan pendekatan teknis. (Candel & Biesbroek, 2016) menegaskan bahwa kegagalan mitigasi bencana seringkali lebih disebabkan oleh lemahnya integrasi kebijakan dan koordinasi kelembagaan daripada ketiadaan data teknis. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini menggunakan *Policy Integration Framework* (Candel & Biesbroek, 2016) untuk menganalisis persoalan pergerakan tanah dari perspektif kebijakan publik dan tata kelola pemerintahan. Melalui analisis empat dimensi—*policy frame, subsystem involvement, policy goals, dan policy instruments*—ditemukan bahwa akar permasalahan mitigasi di Kabupaten Sukabumi bukan semata keterbatasan teknologi, melainkan perbedaan orientasi antarinstansi, lemahnya koordinasi lintas sektor, benturan kepentingan pembangunan dengan pengurangan risiko bencana, serta belum sinkronnya instrumen kebijakan dan penganggaran daerah (Pemerintah Kabupaten Sukabumi, 2019). Kebaruan penelitian ini terletak pada perspektif kebijakan publik dan tata kelola yang selama ini masih jarang dibahas dalam kajian pergerakan tanah di Kabupaten Sukabumi.

5.4. Implikasi Penelitian

5.4.1 Implikasi Teoritis

Penelitian ini memperkuat relevansi *Policy Integration Framework* dari PVMBG, 2024; BMKG, 2026 dalam menganalisis mitigasi bencana lintas sektor. Persoalan pergerakan tanah di Kabupaten Sukabumi terbukti tidak hanya dipengaruhi faktor alam seperti curah hujan tinggi dan kerentanan geologi ekstrem (PVMBG, 2024; BMKG, 2026), tetapi juga oleh lemahnya integrasi kebijakan antarinstansi. Melalui keempat dimensi analisis, penelitian ini menunjukkan bahwa orientasi sektoral yang berbeda antarinstansi, koordinasi yang masih administratif, pembangunan yang terus berlangsung di kawasan rawan meskipun telah diatur dalam RTRW dan RPPLH (Pemerintah Kabupaten Sukabumi, 2019), serta pola *silo budgeting* dan lemahnya pengawasan tata ruang menyebabkan mitigasi bencana masih lebih berorientasi pada respons pascabencana daripada pencegahan. Temuan ini memperluas kajian mitigasi dari pendekatan teknis-geologi menuju perspektif kebijakan publik dan tata kelola lintas sektor.

5.4.2 Implikasi Praktis

Secara praktis, ego sektoral antarinstansi dan belum optimalnya *collaborative governance* menyebabkan penanganan pergerakan tanah masih bersifat parsial. Regulasi yang ada belum sepenuhnya diikuti pengawasan yang konsisten, terbukti dari masih berlangsungnya pembangunan di kawasan rawan bencana dalam RTRW Tahun 2023–2043 (Pemerintah Kabupaten Sukabumi, 2023). Mengingat tingginya kerawanan longsor akibat topografi perbukitan dan curah hujan tinggi (PVMBG, 2024; BMKG, 2026), pemerintah daerah perlu segera memperkuat sistem peringatan dini, pengawasan tata ruang, rehabilitasi lereng kritis, dan kesiapsiagaan masyarakat agar penanganan pergerakan tanah mampu menekan risiko secara berkelanjutan, tidak sekadar reaktif pascabencana.

5.5. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi literatur (*library research*) berbasis data sekunder berupa dokumen kebijakan, jurnal ilmiah, dan laporan pemerintah, sehingga belum mampu menggambarkan secara langsung dinamika koordinasi antarinstansi maupun persepsi masyarakat di lapangan. Penelitian juga terbatas pada aspek kebijakan publik dan tata kelola pemerintahan, sehingga belum membahas aspek teknis geologi seperti stabilitas lereng dan karakteristik geoteknik tanah. Selain itu, analisis dibatasi pada data kebencanaan dan perkembangan kebijakan hingga tahun 2026, sehingga dinamika penanganan bencana setelah periode tersebut belum tercakup dalam penelitian.

5.6. Rekomendasi / Saran

5.6.1. Untuk Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah perlu memperkuat integrasi kebijakan mitigasi bencana dan kebijakan lingkungan melalui tata kelola kolaboratif lintas sektor. Sinkronisasi antara RTRW, RPPLH, RPJMD, dan RPB perlu ditingkatkan agar kebijakan tata ruang, perlindungan lingkungan, dan pengurangan risiko bencana berjalan konsisten dan saling mendukung. Pembangunan sistem data kebencanaan terpadu yang dapat diakses bersama oleh seluruh instansi terkait juga menjadi kebutuhan mendesak agar perencanaan pembangunan dan pengawasan tata ruang tidak berjalan parsial. Di sisi preventif, penguatan *early warning system*, pemantauan gerakan tanah berbasis data geospasial, rehabilitasi lereng kritis, dan pembangunan infrastruktur mitigasi perlu diprioritaskan, disertai penguatan pendekatan sosial melalui edukasi kebencanaan dan pengembangan desa tangguh bencana.

5.6.2. Untuk Penelitian Selanjutnya

Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan *mixed methods* yang mengombinasikan data kebijakan, wawancara, observasi lapangan, dan analisis spasial agar diperoleh gambaran yang lebih empiris mengenai implementasi integrasi kebijakan mitigasi bencana. Pengembangan kajian teknis geologi, analisis SIG, studi komparatif

antarwilayah, serta evaluasi efektivitas kebijakan pasca-2026 juga penting untuk mendorong penelitian mitigasi bencana yang lebih komprehensif dan multidisipliner.

Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan menganalisis hambatan integrasi kebijakan mitigasi bencana dan kebijakan lingkungan dalam penanganan pergerakan tanah di Kabupaten Sukabumi. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa integrasi kebijakan belum berjalan optimal karena koordinasi lintas sektor masih lemah dan implementasi kebijakan belum dilakukan secara terpadu. Meskipun berbagai regulasi dan dokumen perencanaan daerah telah memuat agenda pengurangan risiko bencana dan perlindungan lingkungan, pelaksanaannya masih cenderung sektoral. Pergerakan tanah belum dipahami sebagai isu pembangunan yang membutuhkan keterpaduan antarinstansi, sehingga koordinasi yang dilakukan lebih bersifat administratif dibanding kolaboratif.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa hambatan integrasi terjadi pada aspek tujuan kebijakan, koordinasi kelembagaan, dan instrumen pelaksanaan kebijakan. Pengurangan risiko bencana masih sering kalah prioritas dibanding kepentingan pembangunan ekonomi jangka pendek, yang terlihat dari masih adanya aktivitas pembangunan di kawasan rawan longsor. Selain itu, pemanfaatan data kebencanaan belum terintegrasi antarinstansi dan pola penganggaran masih berjalan terpisah, sehingga upaya mitigasi lebih banyak berfokus pada penanganan pascabencana daripada pencegahan risiko jangka panjang. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tata kelola mitigasi bencana di Kabupaten Sukabumi masih menghadapi persoalan sinkronisasi kebijakan dan lemahnya pengawasan tata ruang.

Berdasarkan hasil tersebut, penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan koordinasi lintas sektor melalui sinkronisasi dokumen perencanaan daerah, pengembangan sistem data kebencanaan terpadu, dan pengawasan tata ruang yang lebih konsisten. Pemerintah daerah juga perlu menggeser pendekatan mitigasi dari reaktif menjadi preventif melalui rehabilitasi kawasan rawan, penguatan sistem peringatan dini,

dan pengembangan skema pembiayaan lintas sektor yang berkelanjutan. Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam pengawasan lingkungan dan kesiapsiagaan bencana perlu diperkuat melalui pengembangan desa tangguh bencana. Secara akademis, penelitian ini berkontribusi dalam memperluas kajian pergerakan tanah dari perspektif teknis menuju pendekatan kebijakan publik dan tata kelola lintas sektor dalam mitigasi bencana daerah.

Daftar Pustaka

- Awaludin, A. (2023). *Pergerakan tanah di Cireunghas Sukabumi, bermula dari kolam retak-sawah amblas*. <https://www.sukabumi.update.com>
- Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika. (2026). *Analisis Curah Hujan Ekstrem Periode Februari-Maret Kawasan Barat Jawa Barat*. BMKG Pusat.
- Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika. (2024). *Analisis fisis atmosfer dan akumulasi curah hujan ekstrem pemicu bencana hidrometeorologi Provinsi Jawa Barat*. BMKG.
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2019). *Laporan Kronologis Dampak dan Korban Longsor Cisolok Sukabumi*. BNPB Indonesia.
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sukabumi. (2025). *Data kebencanaan Kabupaten Sukabumi*. BPBD Kabupaten Sukabumi.
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sukabumi. (2026). *Data kejadian dan dampak pergerakan tanah Kabupaten Sukabumi tahun 2020-2026*. BPBD Kabupaten Sukabumi.
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat. (2025). *Laporan Teknis Amblesan Akses Jalan Strategis Cisolok*. Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Jabar.
- Biesbroek, R. (2021). Policy integration and climate change adaptation. *Current Opinion in Environmental Sustainability*, 52, 75–81. <https://doi.org/doi.org>
- Candel, J. J., & Biesbroek, R. (2016). Toward a process of policy integration. *Policy Sciences*, 49(3), 211–231.

- Carter, W. N. (1991). *Disaster management: A disaster manager's handbook*. Asian Development Bank.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2002). *Kamus besar bahasa Indonesia (Ed. 3)*. Balai Pustaka.
- Detikcom. (2024). *Pergerakan tanah bikin jalan retak dan ambles di Sukabumi*. <https://www.detik.com>
- Fatimah, S. (2023). *Miris! 6.508 bangunan SD di Sukabumi rusak*. <https://www.detik.com/jabar>
- Flick, U. (2018). *An introduction to qualitative research* (6th ed.). SAGE Publications.
- Indonesia, C. (2026). *Tembok rumah pecah-hancur rata tanah dihantam musibah pergerakan tanah*. <https://www.cnbcindonesia.com>
- Knill, C., & Tosun, J. (2020). *Public Policy: A New Introduction*. Red Globe Press.
- Liputan6. (2026). *Pilu warga Sukabumi terdampak tanah bergerak, sahur dan berbuka dalam ketidakpastian*. <https://www.liputan6.com>
- Megapolitan, A. (2021). *Bencana pergerakan tanah di Cisolok Sukabumi sebabkan rumah retak dan ambruk*. <https://www.antaranews.com>
- Merawati, M., Yustiana, I., & Somantri, S. (2022). SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS PEMETAAN BENCANA PERGERAKAN TANAH KABUPATEN SUKABUMI. *JIPi (Jurnal Ilmiah Penelitian Dan Pembelajaran Informatika)*, 7(3), 945–957. <https://doi.org/10.29100/jipi.v7i3.3157>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Pemerintah Kabupaten Sukabumi. (2015). *Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten Sukabumi*. Pemerintah Kabupaten Sukabumi.

- Pemerintah Kabupaten Sukabumi. (2019). *Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Sukabumi Tahun 2019-2025*. BPBD Kabupaten Sukabumi.
- Pemerintah Kabupaten Sukabumi. (2021). *Kajian Risiko Bencana Kabupaten Sukabumi*. Pemerintah Kabupaten Sukabumi.
- Pemerintah Kabupaten Sukabumi (2021). *Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026*. Pemerintah Kabupaten Sukabumi.
- Pemerintah Kabupaten Sukabumi. (2023). *Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sukabumi Tahun 2023-2043*. Pemerintah Kabupaten Sukabumi.
- Pemerintah Kabupaten Sukabumi. (2024). *Laporan Rekapitulasi Kejadian Bencana Gerakan Tanah Wilayah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2023*. Sekretariat Daerah Kabupaten Sukabumi.
- Polri, H. (2026). *Rilis Tanggap Darurat Evakuasi Warga Terdampak Longsor Bantargadung*. Polres Sukabumi.
- Prawira, K. Y., Mataburu, I. B., & Hijrawadi, S. N. (2024). LANDSLIDE VULNERABILITY IN PURABAYA DISTRICT, SUKABUMI REGENCY. *Jurnal Samudra Geografi*, 7(1), 21–29. <https://doi.org/10.33059/jsg.v7i1.12064>
- Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi. (2018). *Tanggapan bencana gerakan tanah di Sukabumi Jawa Barat*. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. <https://esdm.go.id>
- Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi. (2024). *Peta zona kerentanan gerakan tanah Kabupaten Sukabumi*. PVMBG Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
- Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Kabupaten Sukabumi. (2023). *Data Spasial Titik Lokasi dan Dampak Pergerakan Tanah Kecamatan Nyalindung*. Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Kabupaten Sukabumi.

- Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104, 333–339. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039>
- Tahani, R. A., & dkk. (2026). Penguatan peran Linmas dalam mitigasi bencana berbasis desa: Studi kasus di Desa Pasir Suren. *Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 10(1), 15–24.
- Tatar Sukabumi. (2019). *Seminggu pasca pergerakan tanah Nyalindung Sukabumi puluhan rumah rusak ratusan jiwa mengungsi*. <https://www.tatarsukabumi.id>
- Weale, A., & Jordan, A. (2001). Environmental policy: General overview. In *International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences* (pp. 4661–4665).
- Widjojo. (1985). *Mekanisme gerakan tanah dan sistem penahan lereng*. Pusat Penelitian dan Pengembangan Pengairan.
- Yo, I. A. (2019). *Simulasi pergerakan tanah dan saran tindakan mitigasi di Desa Sirnaresmi, Sukabumi dengan menggunakan program Flo-2D dan RAMMS*.